

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak runtuhnya kerajaan Sunda pada tahun 1579 pusat kekuasaan di Jawa Barat terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Pada abad ke-17 sebagian wilayah yang nantinya disebut dengan Priangan dibagi menjadi beberapa kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Bupati-bupati di pulau Jawa mengalami pasang surut dalam kedudukan serta peranannya. Bila pada masa kekuasaan VOC (1602-1799) para bupati memiliki sebuah kekuasaan yang sangat besar khususnya selaku penguasa tradisional, maka pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda terutama sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) mengalami beberapa kemerosotan karena adanya beberapa pembatasan-pembatasan. Mereka diangkat menjadi pejabat-pejabat penerima gaji yang ditempatkan dalam sebuah kerangka kerja yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat (Sutherland, 1983, hlm. 35). Pada masa tanam paksa (1830-1871) kedudukan para bupati tersebut dipulihkan kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dukungan dalam pelaksanaan eksploitasi itu.

Secara khusus sejak masa VOC, di wilayah Priangan diberlakukan *Preangerstelsel*, yang memanfaatkan ikatan-ikatan feodal para bupati dan rakyatnya untuk kepentingan perdagangan VOC. Dalam sistem ini para bupati diwajibkan menyerahkan sebuah hasil bumi tertentu dengan mendapat sebuah ganti rugi yang besarnya sudah ditentukan oleh VOC. Penyerahan wajib ini disebut dengan *Verplichte Leverantie* (Klein, 1931, hlm. 4-5). Pada tanggal 1 Januari 1871, *Preangerstelsel* dihapuskan, bertepatan dengan dilakukannya reorganisasi priangan. Wilayah Priangan dibagi menjadi 9 Afdeling yang masing-masing diperintah oleh para residen. Diantara afdeling – afdeling tersebut ada yang bersatu dengan Kabupaten, ada pula yang berdiri sendiri, Cianjur dan Bandung termasuk kepada kelompok pertama.

Setelah reorganisasi tersebut, kekuasaan para bupati Priangan sangat merosot. Karena adanya asisten residen sebagai penguasa sebenarnya di wilayah-wilayah afdeling yang sudah ditentukan. Di samping itu, wilayah kabupaten juga berkurang karena sebagian dijadikan wilayah afdeling

Rega Resdiyawan , 2021

ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

baru. Seorang bupati di pojokan ke dalam figure status seremonial belaka. Sekalipun demikian bupati masih diberi peranan sebagai pengatur berbagai produksi yang dikelola oleh Belanda. Dalam masa-masa demikianlah R.A.A Wiranatakusumah V diangkat menjadi Bupati Cianjur pada tahun 1912. Hingga kemudian menggantikan Bupati R.A.A Martanegara pada tahun 1920 sebagai Bupati Bandung. Kemudian dilanjutkan menjadi pengurus Volksraad pada tahun 1931 dan dilanjutkan menjadi Bupati Bandung pada tahun 1935-1945 (Lubis, 2000, hlm. 3). R.A.A Wiranatakusumah V meniti karir dari daerah sebelum muncul menjadi seorang tokoh nasional yang sangat dikagumi. Selama delapan tahun (1912-1920) memerintah Cianjur, Wiranatakusumah V mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya menak Cianjur (Wiradiredja, 2012, hlm. 289). Wiranatakusumah V juga berjasa dalam pembangunan kota dan kabupaten Bandung. Hingga namanya dijadikan sebagai salah satu nama jalan di kota Bandung (Kunto, 1984, hlm. 205). Kiprah Wiranatakusumah V tidak berhenti pada masa yang disebut sebagai Pergerakan Nasional. Tetapi juga berlanjut pasca Indonesia Merdeka.

Menurut Sofiani (2018, hlm. 9) “Politik Etis membawa dampak besar dalam bidang pendidikan, yaitu semakin banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan di Hindia Belanda.” Sehingga cukup banyak bermunculan tokoh berpengaruh di Indonesia ketika menjelang kemerdekaan. Mayoritas tokoh-tokoh tersebut muncul dari kalangan menak atau bangsawan, yang telah memperoleh pendidikan secara intelektual sehingga dirinya mampu berpikir akan kemajuan bangsa. Mayoritas pemimpin bangsa pada saat itu tidak lain adalah yang masih mempunyai darah ningrat dan mau berjuang demi terbangunnya bangsa yang baru hingga lahirnya kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, masa-masa sulit justru kembali menghadang laju kemerdekaan Indonesia. Tantangan bangsa ini ingin membangun sebuah konstitusi negara mengalami jalan yang sangat terjal, dimana muncul fase akan seperti apakah negara ini. Banyak pertentangan dari para pemimpin bangsa, mengenai harus seperti apakah bangsa ini kedepannya. Dalam perdebatannya mengenai negara yang akan didirikan (kelak) *para the founding fathers* berolah pikir dan berargumentasi mengenai bagaimana menetapkan dan menjaga sebuah wilayah

Rega Resdiyawan , 2021

**ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kedaulatan Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mengenai batas-batas wilayah (Zuhdi, 2014, hlm. 42).

Dinamika setelah kemerdekaan itu pada akhirnya disebut dengan masa Revolusi Indonesia. Proses perubahan yang sangat cepat yang dilakukan oleh sebuah negara yang pada awalnya dijajah menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri dan berusaha terbentuk oleh negara itu sendiri. “Peristiwa Revolusi merupakan dimana rakyat Indonesia bergerak bersama menata kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, yakni dengan menghapuskan kolonialisme untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa.” (Limah, Utomo & Suryadi, 2018, hlm. 39).

Hal yang selalu menjadi masalah dalam perjuangan Indonesia pada masa Revolusi adalah pemahaman konsep Nasionalisme di Indonesia setelah merdeka. Indonesia merupakan sebuah negara dengan berbagai ras dan budaya yang hidup didalamnya, maka dari itu pematangan mengenai pemahaman Nasionalisme sangatlah penting. Nasionalisme merupakan ruh dari terbentuknya sebuah bangsa, yang menopang lahirnya sebuah konstitusi negara. Konsep nasionalisme sebuah bangsa tidaklah lahir begitu saja namun dibentuk atas kesadaran bangsa itu sendiri, yang biasanya muncul atas dasar sesuatu yang dirasakan, dialami dan dilakukan bersama. Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media Bahasa (Aman, 2008, hlm. 7).

Konsep nasionalis di Indonesia mulai muncul ketika masa pergerakan melawan penjajahan yang berkuasa di Indonesia. Dan seperti kita ketahui tokoh yang pertama memperjuangkan nasionalisme bangsa ini adalah Soekarno. Soekarno ingin mempersatukan seluruh elemen masyarakat nusantara menjadi sebuah satu kesatuan. Elemen masyarakat itu tidak lain adalah Nasionalis, Islamis serta Marxis. Konsep yang penting dalam sebuah nasionalisme adalah sebuah keserasian atau keseimbangan. Bila tidak adanya keserasian akan menjadi masalah berat bagi sebuah bangsa yang akan memunculkan konflik internal bangsa itu sendiri (Purwanto, 2001, hlm. 249). Menurut Soekarno, ada tiga konsep dalam revolusi Soekarno di era 1945-1967 yaitu, revolusi sosial, revolusi politik dan revolusi ekonomi (Jamil dkk, 2017, hlm. 19). Secara umum memang

Rega Resdiyawan , 2021

ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

benar Soekarno merupakan tokoh agung di balik kemerdekaan Indonesia. Namun bangsa ini memiliki cukup banyak para pemimpin hebat dibalik kemerdekaanya.

Pada saat itu khususnya pada masa revolusi masih cukup banyak pemimpin yang bimbang akan arah pemikiran mereka mengenai arah negara, ikut belanda atau republik. Pada saat itu keadaan republik belum cukup kuat, dan belanda datang kembali untuk merusak kemerdekaan Indonesia. Namun, disamping lemahnya republik dan adanya pengaruh Belanda, pemimpin beraliran republikan masih tetap kuat dengan pahamnya. Politik eitishlah yang menyebabkan lahirnya para pemimpin terkemuka yang melawan dari penjajahan itu sendiri yang lebih mengedepankan rasa nasionalis atau kesadaran nasionalis bangsanya. Berkembangnya pendidikan selain komunikasi, urbanisasi, dan transportasi menjadi faktor penyebab tingginya mobilisasi sosial yang pada akhirnya menimbulkan perubahan sosial (Sofiani, 2018, hlm. 9).

Saat terjadinya revolusi di Indonesia, secara politis memang banyak dinamika yang terjadi, maka dari itu muncul golongan republikan dan kontrarevolusi (Kahin, 2013, hlm. 56). Wiranatakusumah V termasuk dalam pemimpin yang memiliki sebuah pandangan republikan. Pemimpin republikan merupakan pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tak mengenal akan adanya sistem monarki yang melahirkan pemimpin berdasarkan keturunan, tetapi pemimpin itu adalah yang dipilih oleh rakyatnya. Bagi mereka kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyatnya. Selain itu, ia lebih condong mendukung negara kesatuan dengan tidak melihat budaya dan etnis tertentu dibandingkan dengan kaum kontra revolusi yang lebih memilih setuju dengan apa yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia (Reid, 1996, hlm. 23). Selain itu, cukup menarik bahwa pemimpin atau elit politik pada saat itu yang memang mayoritas kalangan menak, beberapa berpaham republikan dan beberapa berpaham kontra revolusi.

Dinamika masa revolusi memang sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan dua corak perlawanan pada masa revolusi, yakni perlawanan diplomatis dan juga militer. Keduanya saling keterhubungan antar satu dengan yang lain, di mana situasi dan kondisi di lapangan akan berdampak pada perlawanan diplomatis sebagaimana banyak dilakukannya perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan pihak kolonial Belanda pada masa revolusi, perjanjian tersebut, antara

Rega Resdiyawan , 2021

**ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lain seperti perjanjian Linggarjati, *Renville*, *Roem Royen* dan Konferensi Meja Bundar (Kahin, 2013, hlm. 151). Salah satunya dalam perjanjian *Renville*, menurut Sjamsuddin, et al (1992, hlm. 28) sebagai konsekuensi dari persetujuan perjanjian *Renville* bulan Januari 1948, maka salah satu dampaknya adalah lahirnya negara-negara bagian, salah satunya adalah Negara Pasundan. Pemimpin awalnya adalah Suria Kartalegawa kemudian dilakukan pemilihan ulang dan menjadikan Wiranatakusumah V sebagai pemimpin, Wiranatakusumah V memang bukan kandidat yang diunggulkan dalam pemilihan calon wali negara, karena dirinya saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, hal ini membuat cukup terkejut pihak Belanda karena diluar ekspektasi mereka atas terpilihnya wali negara pada Konferensi Jawa Barat tersebut. Setelah terpilih pun, sikap Wiranatakusumah V masih saja memegang prinsip republikannya dan tidak setuju akan adanya Negara Pasundan, beliau meyakini tindakannya ini adalah sebagai pengalaman dari prinsip republikannya dan tidak mengkhianati Republik (Mulyana, 1996).

Wiranatakusumah V merupakan salah satu dari sedikitnya pemimpin keturunan suku sunda yang muncul pada saat itu. Meskipun memang menurut Rosidi (2009) disebutkan banyak juga tokoh-tokoh Sunda yang ikut aktif dalam kancah politik lokal maupun nasional. Rosidi (2009) membagi tiga kategori tokoh Sunda tersebut, 1) tokoh sastra lama yaitu Sangkuriang, Si Kabayan, Mundinglaya Dikusumah dan Purba Sari Ayu Wangi. 2) tokoh-tokoh sastra baru seperti Raden Yogaswara, Dewi Pramanik-Ratna Suminar dan Karnadi. 3) tokoh-tokoh sejarah baru seperti Dipati Ukur, Ki Tapa, Pangeran Kornel, Haji Hasan Mustapa dan Dewi Sartika. Namun, meskipun begitu, yang memiliki peranan jauh lebih penting dan fundamental adalah peranan dari R.A Wiranatakusumah V. Perannya tidak hanya berpengaruh dan berdampak bagi orang Sunda tapi juga terhadap masyarakat luas terutama masyarakat Indonesia. Meskipun dinamika yang terjadi pada saat itu R.A Wiranatakusumah V dibenturkan dengan banyak tokoh-tokoh Sunda lain yang bertentangan seperti Suria Kartalegawa, juga orang-orang Sunda yang sejalan dengan R.A Wiranatakusumah V, seperti R.A Martanegara, R. Adjoe, Iwa Kusumasumantri dan lain sebagainya. Tetapi, peranan R.A Wiranatakusumah V memiliki peran yang jauh lebih penting dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, akibat dari kontribusi dan perannya

Rega Resdiyawan , 2021

**ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap masyarakat Sunda dan Indonesia terutama ketika dirinya menjadi Menteri Dalam Negeri, Wali Negara Pasundan dan mengembalikan kembali Negara Pasundan ke dalam Republik Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengkaji kiprah politik Wiranatakusumah V saat menjadi Menteri Dalam Negeri hingga Wali Negara Pasundan pada tahun 1945 hingga 1950.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana latar belakang politik R.A.A. Wiranatakusumah V?
2. Bagaimana peranan Wiranatakusumah V sebagai Menteri Dalam Negeri dan Wali Negara Pasundan?
3. Mengapa Wiranatakusumah V yang memiliki pemikiran republikan menjadi Wali Negara Pasundan?
4. Bagaimana berakhirnya kiprah politik Wiranatakusumah V?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Mendeskripsikan latar belakang politik seorang pemimpin sunda yaitu Wiranatakusumah V.
2. Menganalisis peranan Wiranatakusumah V dalam laju politik nasional.
3. Menganalisis dinamika pemikiran Wiranatakusumah V yang merupakan seorang *republican* menjadi Wali Negara Pasundan.
4. Menganalisis faktor penyebab Wiranatakusumah V mengakhiri perannya dalam politik nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya penulisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya mengenai Sejarah Revolusi Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan dan referensi untuk topik kajian “*R. A. A. Wiranatakusumah V: Kiprah Politik Tokoh Sunda Dalam Kancah Nasional (1945-1950)*”

Rega Resdiyawan , 2021

**ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Memperkaya materi pembelajaran sejarah wajib di SMA/ sederajat tentang Kompetensi Dasar 3.6 mengidentifikasi tokoh nasional dan tokoh daerah di dalam kemerdekaan Republik Indonesia
4. Menumbuhkan rasa kebanggaan akan sejarah nasional.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Adapun struktur organisasi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan akan berisi mengenai segala hal yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi dan sistem penelitian dan akan menjadi pedoman bagi keterkaitan dengan bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Pustaka akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan konten penelitian seperti konsep atau teori yang menjadi acuan dalam keterkaitannya dengan konten penelitian. Penelitian terdahulu juga dibahas sebagai contoh untuk penelitian dari penulis dan juga supaya terhindar dari plagiarisme penelitian terdahulu, memiliki keterhubungan dengan penelitian penulis.

Bab III Metode Penelitian akan dipaparkan metode penelitian, di bab ini akan dibahas mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Bab IV Temuan dan Pembahasan akan dipaparkan Temuan dan Pembahasan mengenai *R. A. A. Wiranatakusumah V: Kiprah Politik Tokoh Sunda Dalam Kancah Nasional (1945-1950)*". Temuan-temuan yang berhasil ditemukan dari sumber yang merupakan bagian dari metode penelitian yang diolah menjadi suatu pembahasan dan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi ini merupakan bab bagian terakhir dari penelitian, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dari temuan dan pembahasan dari bab sebelumnya. Dan juga penulis akan memberikan rekomendasi untuk hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian seperti

Rega Resdiyawan , 2021

**ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai konten yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Rega Resdiyawan , 2021

*ADIPATI ARIA WIRANATAKUSUMAH V:
KIPRAH POLITIK TOKOH SUNDA DALAM KANCAH NASIONAL (1945-1950)*
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu